

Fungsi dan Peran Karya Sastra dari Masa ke Masa

Yosep Bambang Margono Slamet

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus

1945 Semarang

yosep-bambangms@untagsmg.ac.id

Abstract

This paper discusses the function and role of literary works in Indonesian society from time to time. The functions and roles of literature are closely related to the conditions of society and government. In contemporary Indonesian society today, the function and role of literature is increasingly important because literature can be a unifying tool of the nation. Through literature every group with different ethnic and cultural backgrounds can learn to understand other community groups to cultivate empathy, sympathy, and respect.

Keywords: sastra, masyarakat, cermin, jendela, persatuan dan kesatuan bangsa

Abstrak

Paper ini membicarakan tentang fungsi dan peran karya sastra dalam masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Fungsi dan peran sastra terkait erat dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan. Dalam masyarakat Indonesia kontemporer saat ini, fungsi dan peran sastra semakin penting karena sastra bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Melalui sastra setiap masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya berbeda bisa belajar memahami kelompok masyarakat lain untuk menumbuhkan empati, simpati, dan rasa menghargai.

Kata kunci: literature, society, mirror, window, unity of the nation

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini Indonesia diguncang berbagai macam isu dan permasalahan yang mengancam keutuhan bangsa, baik yang terkait dengan politik, agama, kelompok etnis, maupun terorisme. Perhatian Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terfokus pada bagaimana mengatasi berbagai persoalan tersebut, disamping mengatasi masalah ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tengah hiruk-pikuk kondisi bangsa yang

demikian, seberapa besar atau penting fungsi dan peran karya sastra dalam memecahkan persoalan bangsa? Masihkah sastra memiliki fungsi dan peran untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik? Melalui tulisan ini. Saya berargumentasi bahwa sebenarnya sastra bisa menjadi salah satu alternatif untuk ‘mendinginkan’ suasana panas masyarakat kontemporer Indonesia saat ini dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Persoalan yang mengemuka yang terkait dengan sastra saat ini adalah bahwa sebagai salah satu bentuk karya seni, fungsi dan peran sastra saat ini semakin terdegradasi. Bangsa kita secara keseluruhan bukan merupakan bangsa yang suka membaca (Saleh dkk., 2007), melainkan bangsa yang suka berbicara. Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, PP ini tetap tidak bisa mengangkat harkat dan martabat sastra Indonesia (dan daerah) di mata bangsa Indonesia sendiri. Ironisnya, hingga saat ini Pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum melakukan upaya maksimal untuk memotivasi bangsa ini agar gemar membaca.

Untuk membicarakan fungsi dan peran sastra dalam masyarakat Indonesia dari masa ke masa ini, saya akan memulainya dengan membicarakan hubungan antara sastra dan masyarakat, lalu disusul dengan pembicaraan tentang peran sastra Indonesia dan sastra daerah dari masa ke masa, dan berikutnya tentang peran sastra dalam masyarakat kontemporer Indonesia saat ini dan terakhir simpulan.

HUBUNGAN ANTARA SASTRA DAN MASYARAKAT

Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian sastra merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan sebuah bangsa. Di negeri kita, aspek-aspek penting yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara sering disebut dengan istilah ‘ipoleksosbudhankam,’ atau ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Aspek-aspek ini terkait langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, kecuali karya sastra. Berbeda dari aspek-aspek lainnya, sastra tidak pernah terkait langsung dengan kehidupan praktis sehari-hari. Namun demikian, hubungan antara sastra dan masyarakat merupakan hubungan yang sangat erat, sekalipun hubungan ini tidak sederhana melainkan sangat kompleks (Teeuw, 1988).

Sastra dan masyarakat tidak terpisahkan karena karya sastra merupakan cerminan atau refleksi masyarakat dan masyarakat merupakan sumber inspirasi bagi para sastrawan dalam menulis karya mereka (Damono, 2002; Dubey, 2018; Duhan, 2015; Wellek & Warren, 1970). Hal ini berlaku secara universal. Dalam konteks ini pula, para sastrawa memiliki kedudukan khusus dalam masyarakatnya. Sebagai contoh, dalam kajiannya secara

khusus tentang kesusastraan Thailand, Phillips (1987) menyatakan bahwa sastrawan adalah juru bicara masyarakatnya. Pernyataan Phillips ini bisa dibaca bahwa pengarang mendapatkan bahannya dari apa yang terjadi di masyarakat atau di dalam kebudayaannya. Berbeda dari para politisi atau ahli hukum, misalnya, para sastrawan menyuarakan apa yang ada di dalam masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui kode budaya primer, yakni bahasa; dan karya sastra itu sendiri merupakan kode budaya sekunder (Ratna, 2007; Teeuw, 1984).

Sebagai refleksi atau cermin masyarakat, sastra bukanlah dokumen sosiologis atau antropologis, melainkan tiruan kenyataan atau mimesis. Pengertian mimesis sendiri ada dua macam, berdasarkan konsep Plato dan konsep Aristoteles. Menurut Plato, sastra adalah tiruan dunia ideal. Dengan demikian, sastra tidak akan pernah setara dengan kenyataan. Dalam negara yang ideal, demikian Plato menyatakan, para sastrawan tidak memberikan sumbangan positif karena mereka hanyalah meniru kenyataan ideal. Konsep mimesis Plato ini mengandung pengertian negatif. Di sisi lain, Aristoteles, murid Plato, memberi arti berbeda terhadap konsep gurunya. Bagi Aristoteles, sastra bukan hanya merupakan mimesis

atau tiruan semata, melainkan *creatio*, hasil kreasi para sastrawan. Dengan demikian, antara sastra dan kenyataan memang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Bagi Aristoteles, sastra memiliki nilai dan hukumnya sendiri. Sebagai sebuah karya seni, sastra memiliki keindahan atau nilai estetis yang rumit dan kompleks (Ratna, 2007).

Dalam studi sastra, baik di dunia Barat maupun Timur, para sarjana sepakat bahwa dari masa ke masa sastra, sekalipun bukan merupakan dokumen sosiologis maupun antropologis, merupakan bahan yang amat kaya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaannya. Duhan (2015, 200) memberikan contoh tentang pentingnya studi sastra dalam sebuah bangsa. Dalam mengkaji sastra Inggris, misalnya, seseorang akan bisa memahami “... *the wide field of English history, by which we mean the history of English politics and society, manners and customs, culture and learning, and philosophy and religion.*” Studi sastra yang merupakan salah satu cara untuk memahami sejarah politik maupun sosial, adat, kebiasaan dan sebagainya ini tidak hanya berlaku di Inggris melainkan di seluruh bangsa dan negara, termasuk di Indonesia. Wellek dan Warren (1970), menguraikan dengan detail tentang sosiologi sastra yang menyangkut

sosiologi karya itu sendiri, sosiologi pengarangnya, dan hubungan antara karya, pengarang, dan masyarakatnya. Tercakup dalam uraian ini adalah bahwa sastra, yang merupakan refleksi kenyataan, tidak pernah lepas dari kenyataan dan bisa merupakan bahan kajian tentang kenyataan. Karya-karya para sastrawan kita, sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang banyak sekali berkisah tentang apa yang terjadi di masyarakat, apakah itu menyangkut masalah-masalah politik, ekonomi, maupun isu-isu sensitif yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sastra sering kali disebut sebagai jiwa atau semangat jaman atau *Zeitgeist* (Manuaba, 2014). Di sisi lain, kadang sastra juga menentang jamannya. Hal ini terjadi ketika para penguasa bertindak lalim sementara rakyat dalam posisi yang lemah. Dalam kondisi yang demikian beberapa sastrawan muncul menjadi corong atau juru bicara masyarakat dan lewat karya-karyanya, mereka menentang penguasa. Dengan demikian, apakah sastra merupakan *Zeitgeist* atau sebagai bentuk perlawanan, hubungan antara sastra dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks yang lebih luas, tidak ada karya sastra yang diciptakan pengarang tanpa berlandaskan pada kenyataan di dalam masyarakat.

FUNGSI DAN PERAN SASTRA DARI MASA KE MASA

Sastra sebagai refleksi kenyataan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakatnya atau bahkan “memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan” (Rismawati, 2017, 1). Sekalipun sastra menempati posisi istimewa dalam masyarakat, fungsi dan perannya dari masa ke masa tidak sama persis. Perubahan atau perkembangan jamanlah yang membuat peranan sastra tidak sama persis dari masa ke masa. Di bawah ini secara singkat akan diuraikan peranan sastra dalam masa kerajaan Hindu-Budha, masa pra-kemerdekaan, dan masa kemerdekaan, sebelum secara khusus nanti akan dibahas peranan sastra dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Sastra Jaman Kerajaan Hindu-Budha

Dalam masa kerajaan Hindu-Budha, sastrawan dan karya-karyanya menempati posisi strategis. Lazimnya isi karya sastra pada masa-masa kerajaan ini berkisar tentang pemujaan terhadap raja yang berkuasa. Para pujangga kerajaan menciptakan karya sastra yang berkisah tentang keagungan para raja. Para pujangga memang berkarya karena diminta oleh para

raja. Sastrawan jaman dulu disebut *kawi* dan mereka menempati kedudukan yang penting dan terhormat karena mereka memiliki hubungan khusus dengan raja sebagai pelindung. Para kawi tidak menulis secara individual melainkan bersifat istana sentris (Ratna, 2007).

Lebih jauh Ratna mengungkapkan bahwa disamping berkarya untuk raja, dengan karya sastra yang diciptakannya para kawi juga bertujuan untuk mendidik dan memberi petunjuk masyarakatnya. Para kawi menciptakan karya yang indah sekaligus bermanfaat, atau *dulce et utile* menurut Horatius karena dalam sastra lama, estetika dan etika—antara bentuk dan isi—tidak bisa dipisahkan, dalam arti karya sastra yang baik adalah karya yang estetis dan etis. Dari bentuknya, karya sastra lama memiliki aturan-aturan yang ketat. Disamping untuk memenuhi tuntutan estetis, hal ini juga merupakan indikasi bahwa karya sastra lama tidak menekankan pada siapa penciptanya karena para sastrawan tidak berkarya secara individual tadi. Siapa pun penciptanya, aspek estetika menjadi salah satu syarat utama karya sastra lama. Menurut Ratna, “keindahan tertinggi pada gilirannya adalah pertemuan dengan Tuhan” (2007, 335). Oleh karena itu, karya para pujangga atau kawi pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha

bukan hanya dinikmati sebagai hiburan melainkan dijadikan pegangan hidup. Demikian pula, di dunia Barat, konsep *dulce et utile* atau indah dan bermanfaat merupakan konsep penting yang dianut oleh para sastrawan. Sastra menawarkan keindahan dan manfaat bagi masyarakatnya. Karya sastra klasik secara umum tidak meninggalkan ‘fatwa’ Horatius ini. Di atas sudah disebutkan bahwa karya para pujangga jaman dulu kental dengan aspek estetika dan etika. Dengan demikian, karya sastra tidak cukup kalau hanya berfungsi untuk menghibur, melainkan juga harus mendidik. Karya sastra klasik Jawa, baik yang berupa prosa maupun puisi, selalu mengandung ajaran hidup. Masyarakat, terutama yang berada di lingkungan pusat kerajaan, banyak yang hafal karya para pujangga dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Tetapi dalam perkembangannya, karya sastra tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di pusat-pusat kerajaan melainkan juga oleh masyarakat di luar pusat kerajaan.

Dalam studinya tentang karya-karya sastra Jawa klasik, Florida (2003) mendapati ada begitu banyak kelompok ‘membaca’ karya sastra ini dalam masyarakat Jawa. Perlu diingat di sini bahwa ‘membaca’ di sini berarti

menghafalkan *pupuh-pupuh tembang* atau menceritakan *gancaran* (prosa) secara lisan. Anggota kelompok-kelompok ‘membaca’ ini secara teratur berkumpul untuk belajar ‘membaca’ karya-karya sastra tertentu atau menembangkannya dan mendiskusikan isinya. Menurut Florida, kelompok-kelompok ini tidak hanya ada di pusat kerajaan melainkan juga menyebar di berbagai wilayah di luar pusat kerajaan. Dari temuan Florida ini bisa disimpulkan bahwa sastra Jawa klasik dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya karena keindahannya melainkan juga karena isinya yang berisi tentang ajaran luhur kehidupan. Dengan demikian sastra dalam tradisi masyarakat Jawa memiliki fungsi dan peran yang sangat besar.

Bukan hanya sastra Jawa yang memiliki peran yang demikian, melainkan juga sastra-sastra daerah lainnya di Indonesia. Dalam pengertiannya yang luas, sastra tidak hanya mencakup karya tertulis melainkan juga karya lisan, yang diceritakan dan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sastra lisan ini sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dan tetap tumbuh subur di Jawa, mulai dari pujangga kerajaan Hindu hingga kerajaan Islam. Rismawati (2017) menguraikan secara detil jenis-jenis sastra lisan yang ada di

negeri kita yang begitu berpengaruh terhadap kehidupan, mulai dari pengaruh animisme-dinamisme hingga pengaruh Hindu-Budha. Mantra dalam berbagai jenisnya, legenda, mite, sage, fabel, hingga cerita pewayangan merupakan bentuk-bentuk sastra lisan yang begitu digemari oleh dan berpengaruh pada masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa-masa ini sastra memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dan luas dalam masyarakat kita.

Sastra Jaman Pra Kemerdekaan Hingga Rejim Orde Baru

Pada masa pra kemerdekaan Indonesia, aspek *utile*-nyalah yang menonjol. Studi Sulton (2015) mengenai sastra “bacaan” liar dengan tegas menyebut bahwa fungsi sastra pada jaman pra kemerdekaan adalah sebagai alat perjuangan atau propaganda untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam masa ini, terjadi perubahan yang sangat penting dalam masyarakat pra-Indonesia.

Pergerakan nasional yang dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 memiliki dampak yang sangat besar di bidang sastra. Tujuan akhir dari pergerakan nasional adalah untuk mencapai kemerdekaan. Dengan dipelopori oleh segelintir kaum cerdas

pandai yang mendapatkan pendidikan Belanda pada waktu itu, tulisan (dalam hal ini karya sastra) merupakan sarana penting untuk menggelorakan semangat perjuangan tersebut. Pihak kolonial Belanda mengetahui hal ini dan untuk menampung aspirasi kaum pribumi maka didirikanlah sebuah penerbitan dengan nama *Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur* pada tanggal 14 September 1917, yang kemudian diperpendek namanya menjadi *Commissie voor de Volkslectuur*. Bersama dengan Boedi Oetomo, tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk memberikan pendidikan formal kepada orang-orang pribumi. Di sisi lain, dengan didirikannya penerbitan ini, Belanda melakukan sensor ketat terhadap tulisan-tulisan karya anak bangsa pada waktu itu. Pada tahun 1917, nama penerbitan ini kemudian diubah menjadi Balai Pustaka. Karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka merupakan karya yang sudah disensor oleh Belanda sehingga tidak akan menimbulkan gejolak yang dahsyat dalam menggelorakan semangat perjuangan rakyat untuk memperoleh kemerdekaan.

Namun demikian, semangat pergerakan nasional yang dipelopori oleh Boedi Oetomo tidak bisa dibendung lagi. Karya anak-anak bangsa semakin banyak

dan semakin menggelorakan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak sekali beredar karya sastra dan berbagai jenis bacaan di luar penerbitan resmi milik pemerintah, yakni Balai Pustaka. Apa yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka pada akhirnya dianggap sebagai bacaan “liar” yang tidak disetujui oleh Belanda. Justru dari bacaan-bacaan “liar” inilah semangat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan itu semakin berkobar. Kaum nasionalis radikal, terutama mereka yang tergabung di dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan para penulis yang menghasilkan karya-karya propaganda. Dalam konteks pergerakan nasional pada waktu itu, PKI merupakan ujung tombak yang sangat nyaring dalam menyuarakan perlunya kemerdekaan lepas dari penjajahan. Ada anggapan bahwa justru PKI-lah yang pada waktu itu melakukan propaganda untuk menyadarkan rakyat Hindia Belanda. Suton (2015, 214) menyatakan bahwa

PKI merupakan cikal-bakal nasionalisme melawan dominasi kuasa pemerintah Belanda. Kemudian dari situ pada tahun 1924 PKI mendirikan institusi berupa *Kommissie Batjaan Dari Hoofdbestuur PKI*. Komisi ini menerbitkan dan menyebarkan tulisan-tulisan serta terjemahan-terjemahan “literatur socialisme” menentang terbitan dan

penyebarluasan bacaan-bacaan kaum modal.

Sastra perjuangan semacam ini ternyata bukan hanya milik Indonesia. Amerika Serikat pun, sebelum memperoleh kemerdekaannya dari Inggris, juga melahirkan banyak sastrawan yang menulis tentang karya sastra untuk menggelorakan semangat juang. Karya-karya Thomas Jefferson, Thomas Paine dan Benjamin Franklin, sekalipun sebagian besar bukan merupakan fiksi, bisa dikategorikan sebagai sastra perjuangan (Hasibuan, 2005). Hasibuan mencatat bahwa kesusastraan Amerika pra kemerdekaan ini sangat penting sebagai sarana memperjuangkan kemerdekaan.

Dua contoh di atas, tentang sastra Indonesia dan sastra Amerika Serikat pra kemerdekaan, menyadarkan kita bahwa sastra (atau dalam konteks luas tulisan apa pun) bisa menjadi alat yang ampuh untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran akan pentingnya menjadi bangsa merdeka ditulis oleh para sastrawan dalam karya fiksi maupun dalam bentuk tulisan-tulisan lainnya. Para penulis radikal menulis propaganda secara langsung, seperti yang ditulis oleh para tokoh PKI dalam masa pra kemerdekaan. Di Indonesia, pada masa kemerdekaan, terutama masa demokrasi liberal, PKI

masih tetap menggunakan sastra sebagai alat propaganda. Melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), yang dibentuk pada tahun 1950, para sastrawan yang berafiliasi pada PKI melalui karya-karyanya “bertujuan melawan kebudayaan kolonial, menolak paham seni untuk seni, dan humanisme universal produk kapitalis-borjuis” (Teeuw, 1967, 136). Para tokoh PKI menolak slogan ‘seni untuk seni’ dan memilih slogan ‘seni untuk rakyat.’ Nampak sekali di sini bahwa pengaruh Marxisme begitu menonjol. Apa yang terjadi di Uni Soviet, RRT waktu itu, dan juga negara-negara Eropa Timur yang menganut paham komunisme menjadi semacam *blue print* bagi PKI sebagai alat perjuangannya. Tetapi begitu PKI ditumpas oleh rejim Orde Baru, bisa dikatakan tidak ada tempat bagi para sastrawan yang tergabung dalam LEKRA beserta karya-karya mereka. Segala sesuatu yang berbau kiri dan Marxis diberangus oleh pemerintah Orde Baru. Kejaksaan Agung waktu itu menjadi filter terhadap karya sastra dan seni apa pun yang tidak sesuai dengan ideologi Orde Baru. Bahkan Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar Indonesia, diasingkan ke Pulau Buru. Pada titik ini bisa dipahami bahwa karya sastra (dan seni pada umumnya), merupakan pertarungan

ideologi antara pihak penguasa dan yang dikuasai (Estrelita dalam Artika, 2016). Pihak penguasa menentukan karya sastra mana yang boleh beredar dan mana yang tidak. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologi penguasa, dalam hal ini rejim Orde Baru, tidak boleh ada di negeri ini.

Lambat laun isu komunisme dan PKI semakin menghilang dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai organisasi terlarang, PKI tidak ada lagi. Namun demikian, pemerintah Orde Baru tetap mendengungkan gaung tentang bahaya laten komunisme dan PKI kepada rakyat. Melalui alat-alat negara, Orde Baru menyatakan antipati terhadap PKI. Dengan sistem represi yang demikian ketat, Orde Baru berupaya melanggengkan kekuasaannya. Kondisi seperti ini sekilas memang menunjukkan ketenangan dan ketertiban karena rakyat menjadi takut. Mereka yang tidak setuju berusaha melawan namun perlawanan itu tidak pernah terus-terang dan frontal melainkan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sujito (2014) menyebut perlawanan terhadap Orde Baru melalui sastra ini sebagai perlawanan simbolik dengan contoh Mochtar Lubis melalui novelnya *Harimau! Harimau!* Namun demikian, tidak semua perlawanan bersifat

simbolik yang hanya disadari oleh segelintir pembaca kritis.

Sebagian penyair, berbeda dari rata-rata prosais, lebih terus-terang dalam menyatakan kritik mereka sekalipun tingkat kritik atau perlawanan mereka ini tidak sama. Penyair Si Burung Merak, Rendra, misalnya, sejak awal mengambil posisi sebagai antitesis terhadap Orde Baru. Oleh sebab itu dia tidak memiliki kebebasan penuh dalam mementaskan puisi-puisinya yang sarat dengan kritik sosial. Berbeda dari Rendra, Sapardi Djoko Damono, sekalipun karya-karyanya bisa dikategorikan ke dalam sastra perlawanan, masih menyampaikan kritik atau perlawanannya dengan bahasa yang halus. Oksinata (2010) menyebut bahwa dua penyair ini merupakan penyair priyayi, sehingga perlawanan mereka masih bisa dikategorikan dalam perlawanan halus. Namun demikian, dalam sosok Wiji Thukul—demikian Oksinata menyebut—yang merupakan penyair dari rakyat kebanyakan, perlawanan terhadap Orde Baru terasa begitu intens dan frontal. Salah satu kumpulan puisi Wiji Thukul, *Aku Ingin Jadi Peluru* (2004), merupakan salah satu kumpulan puisi perlawanan yang paling keras bersuara dalam menentang kekuasaan Orde Baru dan ini menyebabkan

penyairnya hilang tiada rimbanya sejak peristiwa 27 Juli 1996 hingga sekarang.

Dari uraian di atas, peran sastra dalam masyarakat Indonesia selama masa Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari sikap rejim Orde Baru yang represif. Menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru, tampak sekali penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya. Namun, di sisi lain, para sastrawan yang merasa tidak memiliki kebebasan penuh, semakin nyaring bersuara lewat karya-karya mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam sastra Indonesia melainkan juga dalam sastra daerah. Dalam sastra Jawa, misalnya, seorang sastrawan Jawa yang juga guru SD dari Kebumen, Turiyo Ragilputra, melalui beberapa puisinya dengan keras juga menyuarakan ‘perlawanannya’ kepada penguasa (Margono, 2003).

FUNGSI DAN PERAN SASTRA DALAM MASYARAKAT INDONESIA KONTEMPORER

Bagaimana peran sastra dalam masyarakat Indonesia kontemporer? Sebelum menjawab pertanyaan ini, lebih dahulu kita lihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Evolusi masyarakat terjadi seiring dengan perkembangan jaman. Masyarakat Indonesia pun

mengalami evolusi dari masa ke masa. Perubahan ini terjadi di segala bidang. Masyarakat komunal-agraris yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia dulu kini sudah semakin terkikis. Kita sudah menjadi bangsa yang berada dalam abad Internet—sama seperti bangsa-bangsa lain—dengan teknologi menjadi penentu dalam banyak aspek kehidupan kita. Konsekuensi dari kemajuan teknologi ini begitu masif terhadap masyarakat kita. Nilai-nilai kebudayaan yang kita junjung tinggi di masa lalu banyak yang sudah kita tinggalkan. Kita dengan begitu mudah terpengaruh oleh apa pun yang datang dari luar. Pengaruh dari luar ini tidak harus dari Barat, melainkan bisa dari mana saja. Namun demikian, masih saja ada di antara kita yang selalu menuduh Barat sebagai pembawa nilai-nilai buruk bagi masyarakat kita sehingga kita meninggalkan nilai-nilai budaya kita sendiri. Hasibuan (2005) merupakan salah seorang yang dengan jelas menunjuk dunia Barat sebagai penyebab dekadensi moral bangsa kita. Namun kita harus bijak bahwa hal semacam ini belum tentu benar dan sebagai masyarakat ilmiah kita harus skeptis.

Harus diakui bahwa ada begitu banyak perbedaan saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Masyarakat kita saat ini terpolarisasi secara masif dan terstruktur.

Ada begitu banyak kelompok masyarakat dengan kepentingan masing-masing, apakah itu terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan atau yang kita kenal dengan isu SARA. Paling tidak selama lima tahun terakhir, bangsa kita menjadi begitu mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas atau yang kita kenal dengan *hoax* atau berita palsu. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat dan kemudahan yang luar biasa bagi manusia, tetapi di sisi lain teknologi juga menjadi mudarat yang mengoyak rasa persatuan dan kebangsaan kita. Atas nama politik, agama atau golongan, kita menjadi begitu mudah marah dan menyalahkan orang lain. Dengan kebebasan yang kita miliki, setiap warga bangsa saat ini, siapa pun dia, bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meresahkan banyak orang. Indonesia yang dulu kita yakini merupakan rumah kita bersama yang tenang dan damai, kini sudah berubah. Apakah memang benar karena semua ini pengaruh buruk dari kebudayaan lain—terutama kebudayaan Barat? Ada baiknya sebagai bangsa kita melakukan refleksi dan introspeksi. Saling mempengaruhi saat ini memang tidak terhindarkan lagi. Sekat-sekat atau batas-batas geografis tidak lagi begitu berpengaruh terhadap kebudayaan kita. Bahkan sekat-sekat atau batas-batas

kebudayaan pun saat ini menjadi semakin nisbi. Namun demikian, kita tetap mengakui bahwa setiap bangsa memiliki nilai-nilai dasar yang tidak berubah yang menjadi pegangan bangsa tersebut.

Dengan semua ini, sastra sebenarnya tetap memiliki fungsi dan peran besar sebagai perekat bangsa. Justru fungsi atau peran inilah yang harus kita kedepankan. Namun demikian, seperti yang sudah diuraikan di atas, bangsa kita saat ini bukan merupakan bangsa yang suka membaca sehingga sastra yang seharusnya merupakan perekat bangsa, menjadi semakin ‘kesepian’ karena ditinggalkan pembaca. Ada ironi yang begitu mendalam mengenai kesusastraan kita. Kita meyakini bahwa sastra mengandung nilai-nilai budi pekerti untuk membuat manusia menjadi lebih baik, tetapi keyakinan itu tidak juga membuat kita menjadi bangsa yang suka membaca karya sastra. Dalam masyarakat Indonesia kontemporer saat ini, sastra dianggap tidak penting bila dibandingkan dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita sehari-hari.

Sebagai bangsa multikultural, sebenarnya khasanah sastra Indonesia sangat kaya. Masih banyak daerah di Indonesia yang hingga saat ini memiliki sastra daerah. Di Batak, misalnya, Sinaga menjelaskan betapa pentingnya sastra etnis

Batak dalam mengembangkan pendidikan karakter, “sastra etnis Batak berupa legenda ataupun *turi-turian* telah membahasakan perilaku yang harus diikuti oleh manusia. Memanfaatkan karya sastra etnis Batak pada dasarnya juga telah ikut serta mengembangkan pendidikan karakter” (2012, 29). Di Jawa, masih banyak orang Jawa yang meyakini bahwa sastra Jawa, baik klasik maupun modern, juga mengandung ajaran-ajaran yang baik. Sastra daerah, karena ditulis dalam bahasa daerah, memiliki fungsi dan peran yang terbatas hanya untuk masyarakat daerah tersebut. Namun intinya adalah bahwa sastra memiliki fungsi dan peran penting dalam pendidikan karakter. Berbeda dari sastra daerah yang fungsi dan perannya terbatas hanya untuk masyarakat daerah tertentu, sastra Indonesia memiliki fungsi dan peran sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena ditulis dalam bahasa Indonesia dan dipahami oleh semua bangsa Indonesia. Sama seperti sastra daerah, sastra Indonesia pun memiliki peran penting dalam pendidikan karakter. Kanzunuddin menyatakan bahwa “... sastra dan pendidikan karakter merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. ... sastra membicarakan berbagai nilai yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia ...” (2012, 201).

Sinaga dan Kanzunuddin menggugah kesadaran kita bersama bahwa karya sastra, yang selama ini sekalipun-penting-tetap-kita-pandang-dengan-sebelah-mata, masih tetap menjadi sarana atau medium yang baik untuk mengembangkan pendidikan karakter. Boleh jadi, “tuduhan” terhadap kebudayaan Barat yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang sangat terpolarisasi dengan kepentingan kita masing-masing dan mengalami dekadensi moral saat ini tidak benar. Dalam kebudayaan mana pun, ada nilai-nilai baik yang diyakini oleh masyarakatnya. Sebaliknya, ada nilai-nilai yang tidak lagi dipakai atau sudah ditinggalkan. Dengan demikian, dalam kebudayaan Barat pun ada nilai-nilai baik. Sastra Inggris dan sastra Amerika, seperti halnya sastra daerah dan sastra Indonesia—seperti yang diungkapkan oleh Sinaga dan Kanzunuddin, juga mengandung nilai-nilai yang bisa digunakan untuk mengembangkan karakter manusia dalam kebudayaan kedua negara tersebut.

Dalam konteks masyarakat kontemporer saat ini, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sastra sebagai perekat bangsa. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, merupakan perekat bangsa yang sangat penting. Tanpa adanya bahasa Indonesia, sulit sekali bagi kita bangsa Indonesia untuk saling berkomunikasi dan

memahami. Oleh karena itu sudah sangat tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP No. 57/2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Keberadaan PP ini menegaskan betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Ke depan, Pemerintah perlu memiliki *political will* yang kuat untuk meningkatkan literasi bangsa agar bangsa kita menjadi bangsa yang suka membaca. Dengan demikian, fungsi dan peran sastra sebagai perekat bangsa akan menjadi semakin terwujud.

Sastra sebagai perekat bangsa bukan sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan atau pemikiran, melainkan bisa diwujudkan. Untuk membicarakan hal ini, saya akan memulainya dengan sedikit membicarakan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Salah satu dampak besar Pergerakan Hak-hak Sipil (*Civil Right Movement*) akhir tahun 1960-an di Amerika Serikat adalah munculnya apa yang disebut sebagai *multicultural education* atau pendidikan multikultural (Banks, 2001). Intinya adalah bahwa pergerakan ini meminta kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk mengakui kesamaan atau persamaan hak seluruh kelompok etnis yang ada di Amerika Serikat. Untuk mewujudkan hal

ini, pendidikan multikultural mutlak diperlukan. Secara garis besar, Banks menyatakan bahwa multikulturalisme berarti mengakui keberagaman dan mengakomodasi kepentingan setiap kelompok etnis. Hal ini tidak bisa semata-merta terwujud melainkan harus dicapai melalui pendidikan. Salili dan Hoosain (2001) menyatakan bahwa tujuan pendidikan multicultural adalah mendidik para siswa untuk tidak hanya memahami melainkan juga menerima dan menghargai perbedaan dalam hal kebudayaan, ras, kelas sosial, agama, dan gender. Para pendukung pendidikan multikultural sepakat bahwa sastra multikultural merupakan salah satu alat penting untuk mewujudkan masyarakat Amerika Serikat yang egaliter (Cai, 2002). Sastra multikultural sendiri berarti sastra yang ditulis oleh tiap kelompok etnis di Amerika Serikat. Karya sastra seperti ini berfungsi sebagai 'jendela' dan 'cermin' (*mirror and windows*). Setiap kelompok etnis di Amerika Serikat bisa melihat diri mereka sendiri dalam karya sastra mereka dan sekaligus melihat masyarakat atau kelompok etnis lainnya dalam karya sastra yang berbeda. Jelasnya, sejak akhir tahun 1960-an, kelompok etnis di Amerika Serikat di luar kulit putih seperti Afrika-Amerika, Asia-Amerika, dan Hispanik-

Amerika mulai menulis karya sastra yang bertutur tentang kelompok etnis dan kebudayaan mereka sendiri. Sastra multikultural ini kemudian menjadi penting dan kemudian diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat.

Dalam konteks inilah, masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat tidak begitu jauh berbeda karena sama-sama multikultural. Bahkan masyarakat Indonesia mungkin lebih multikultural dibanding masyarakat Amerika Serikat. Sekalipun tiap daerah memiliki budaya dan sastra sendiri-sendiri, dengan adanya bahasa Indonesia maka sastra kita menjadi seperti sastra yang ada di Amerika Serikat. Penulis dari masing-masing kelompok etnis dan budaya yang menulis dalam bahasa Indonesia bisa dipahami oleh semua komponen bangsa. Memang benar bahwa mereka menulis karya yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari—apakah itu kebudayaan dalam arti luas atau dalam artinya yang spesifik. Atau, bisa juga dikatakan bahwa sekalipun menulis dalam bahasa Indonesia, sebenarnya para penulis sastra kita menampilkan ciri kedaerahan dan kebudayaannya masing-masing. Esensi karya mereka adalah kebudayaan mereka, tetapi mediumnya adalah bahasa Indonesia.

Kalau kita bisa menggunakan karya sastra kita sebagai ‘jendela’ dan ‘cermin’ seperti halnya fungsi sastra multikultural di Amerika Serikat, niscaya sastra Indonesia akan sangat penting eksistensinya sebagai perekat bangsa. Kurangnya empati, simpati, pemahaman, dan penghargaan terhadap kelompok etnis atau kebudayaan lain salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita terhadap kelompok etnis atau kebudayaan tersebut. Karena sastra merupakan cermin kenyataan, kita sebagai pembaca akan bisa mengetahui banyak hal tentang suatu masyarakat atau kebudayaan lewat karya sastra yang kita baca. Pada dasarnya, situasi kesusastraan antara Amerika Serikat dan Indonesia bisa dikatakan mirip. Berbagai kelompok etnis di Amerika Serikat menulis tentang kelompok mereka dalam bahasa Inggris. Sementara itu, para sastrawan Indonesia menulis dalam bahasa Indonesia. Dari segi bahasa, kita menyebutnya sebagai sastra Indonesia. Tetapi dari segi isinya, kalau kita cermati, para pengarang yang berasal dari berbagai daerah dengan bahasa dan kebudayaan mereka masing-masing sebenarnya bertutur tentang masyarakat dan kebudayaan dari mana mereka berasal. Dalam *Pengakuan Pariyem* (2009), Linus Suryadi AG. banyak bertutur tentang

budaya Jawa. Demikian pula pengarang lain seperti Mangunwijaya, Danarto, dan Umar Kayam. Membaca karya para pengarang ini, pembaca yang berasal dari Jawa bisa menggunakan karya-karya mereka sebagai cermin. Mereka bisa melihat diri sendiri dalam karya-karya para pengarang tersebut. Tetapi bagi pembaca non-Jawa, karya para pengarang ini bisa berfungsi sebagai jendela; mereka bisa belajar memahami masyarakat dan kebudayaan Jawa. Sebaliknya, para pembaca Jawa bisa belajar banyak tentang masyarakat dan kebudayaan lain dari karya sastra yang ditulis oleh para pengarang non-Jawa. Beberapa contoh yang bisa saya sebut di sini misalnya karya Sutarji C. Bahri dari Riau, Korrie L. Rampan dari Kalimantan Tengah, Gerson Poyk dari Rote, Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya.

Untuk mewujudkan fungsi dan peran sastra untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah *political will* yang kuat dari Pemerintah. PP No. 57/2014 harus diberlakukan dengan sebaik-baiknya. Perlu ada instruksi lebih lanjut yang jelas dan berjenjang, mulai dari pusat hingga daerah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat secara luas. Kita mestinya

malu sebagai bangsa karena minat baca kita sangat rendah dan kita hanya pintar omong yang tidak ada juntrungnya saat ini. Kedua, Pemerintah perlu memberikan apresiasi yang layak kepada para pengarang berprestasi, secara nasional maupun regional, baik untuk sastra Indonesia maupun sastra daerah. Perlu ada kampanye terus-menerus bahwa membaca karya sastra itu baik karena akan membuka hati dan pikiran kita terhadap masalah-masalah kemanusiaan secara universal. Dengan membaca banyak karya sastra, kita bisa mengasah hati dan pikiran kita, kita akan terbuka terhadap masyarakat dan kebudayaan lain.

SIMPULAN

Karya sastra sangat terkait erat dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalam masyarakat dan kebudayaan apa pun, karya sastra memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Di Indonesia sendiri, dari masa ke masa, karya sastra memiliki fungsi dan peran yang berbeda atau berubah-ubah, sesuai dengan kondisi jaman. Dalam masyarakat kontemporer Indonesia, sastra memiliki fungsi dan peran yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan fungsi dan peran sastra seperti ini, diperlukan *political will* yang sangat kuat dari Pemerintah, baik

yang terkait dengan masyarakat pembaca maupun para pengarang. Dengan mewujudkan fungsi dan peran karya sastra seperti ini, sebagai bangsa kita berharap memiliki rasa empati, empati, dan penghargaan yang lebih tinggi kepada masyarakat dan kebudayaan yang berbeda dari masyarakat dan kebudayaan kita sendiri. Pada akhirnya, sastra menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang egaliter, saling memahami dan menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Artika, I.W. (2016). Lima cerpen propaganda LEKRA (1950-1965). *Aksara*, 28(2), 129-142.
- Banks, J.A. (2001). Multicultural education: Characteristics and goals. Dalam J. Banks & C. Banks (Ed.), *Multicultural education: issues and perspectives* (3-30). New York: Wiley & Sons.
- Cai, M. (2002). *Multicultural literature for children and young adults: Reflections on critical issues*. Westport, Conn: Greenwood Press.
- Dubey, A. (2013). Literature and society. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 9(6), 84-85.
- Duhan, R. (2015). The relationship between literature and society. *Language in India*, 15(4), 192-202.
- Florida, N.K. (2003). *Menyurat yang silam mengkurat yang menjelang*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Hasibuan, S.R. (2005). Peran sastra dan bahasa dalam pembangunan bangsa: Wacana dan transformasi budaya. Jakarta: Proceeding Seminar Nasional PESAT 2005, Universitas Gunadarma, S1-S8.
- Manuaba, I.B.P. (2014). Eksotisme sastra: Eksistensi dan fungsi sastra dalam pembangunan karakter dan perubahan sosial. Universitas Airlangga Surabaya: Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Sastra pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- Margono, Y.B. (2003). A world out of balance: Javanese society in Turiyo Ragilputra's Poems. Ohio University: Tugas Akhir, tidak dipublikasikan.
- Margono, Y.B. (2017). *Bantulah Indonesia Dengan Membaca*. Yogyakarta: Harfeey.
- Oksinata, H. (2010). Kritik sosial dalam kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Thukul: Kajian Resepsi Sastra. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, Skripsi S1.
- Phillips, H.P. (1987). *Modern Thai Literature: With an Ethnographic Interpretation*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Ratna, N.K. (2011). *Estetika Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rismawati. (2017). *Perkembangan sejarah sastra Indonesia*. Darussalam: Bina Karya Akademika.
- Saleh, A.R., dkk. (2007). Pemetaan Minat Baca Masyarakat: di tiga propinsi (Sulawesi Selatan, Riau, dan

- Kalimantan Selatan). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Salili & Hoosain. (2001). Multicultural education: History, issues, and practices. Dalam F. Salili & R. Hoosain (Ed.), *Multicultural education: Issues, policies, and practices* (1-13). Greenwich, Conn: Information Age Pub.
- Sinaga, A. (2012). Peran sastra etnis Batak dalam mengembangkan pendidikan karakter. *Pena*, 2(3), 15-30.
- Sujito (2014). Perlawanan simbolik terhadap Orde Baru dalam novel *Harimau! Harimau!* Karya Mochtar Lubis (Kajian Hegemoni). *Edu-Kata*, 1(2), 179-190.
- Sulton, A. (2015). Sastra “bacaan liar” harapan menuju kemerdekaan. *Bahasa & Sastra*, 15(2), 213-229.
- Suryadi AG, L. (2009). *Pengakuan Pariyem*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Teeuw, A. (1967). *Modern Indonesian Literature*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Teeuw, A. (1984). *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Thukul, W. (2004). *Aku ingin jadi peluru*. Magelang: Indonesia Tera.
- Wellek, R. dan Warren, A. (1970). *Theory of Literature*. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company.